

KONSEP PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KURIKULUM MERDEK BELAJAR BERBASIS LITERASI

Mas Fierna Janvierna Lusie Putri ^{a1}Adinda Saskia Herlambang^{b,1*}, Aulia Rahma^{b,2}, Popi Anjani^{b,3}
Sela Anggi Savietri^{b,4}

^aDosen; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Universitas Pamulang

^bMahasiswa; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Universitas Pamulang

¹dosen.02649@unpam.ac.id; ²adindahrlm12@gmail.com;
³aulrhma509@gmail.com; ⁴popianjani16@gmail.com; ⁵shellaanggi92@gmail.com

Naskah diterima: 05 Mei 2022, direvisi: 10 Mei 2022, disetujui: 15 Mei 2022

Abstrak

Konsep pemahaman merdeka belajar merupakan sebuah penerapan sistem pembelajaran yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah No. 13 Tahun 2015, perihal perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 terkait Standar Nasional Pendidikan di Indonesia. Dalam topik ini peneliti hendak mengaitkan topik pembahasan pada pemahaman konsep dalam penerapan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di dalam kurikulum merdeka belajar berbasis literasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai sebuah standarisasi penilaian mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Universitas karakter bangsa, tujuan umum lain penelitian ini adalah; sebagai sebuah pembelajaran mengenai pemahaman penerapan pendidikan kewarganegaraan pada sistem merdeka belajar yang berbasis literasi. Serta manfaat penelitian sebagai sebuah wadah bacaan bagi siapapun yang dapat membacanya serta sebagai kajian dan informasi seputar sistem pendidikan merdeka belajar di Indonesia dengan sistem literasi. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif yang bersumber kepada kajian pustaka sebagai sumber terpercaya. Penelitian ini memberikan hasil bahwa; Dengan penerapan model sistem pendidikan merdeka belajar ini, pelaksanaan mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan atau pancasila ini dikaitkan pada pemahaman Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 terkait; politik, hukum, nilai, moral, kerifan lokal dan kebinekaan dalam sistem kebudayaan yang ada di Indonesia.

Kata-kata kunci: Merdeka; Belajar; Kewarganegaraan

Abstract

The concept of understanding independent learning is a reflection of the learning system implemented by the Indonesian government based on government regulation Number 13 of 2015, regarding the Second Amendment to Government Regulation Number 19 of 2005 regarding National Education Standards in Indonesia. In this case, the researcher wants to link the topic of discussion to understanding concepts in the application of civic education learning in an independent curriculum for literacy-based learning. While the objective of this research it is as a standardization of assessment of citizenship education courses at the National Character University, the other general objectives of this research are; as a lesson on understanding the application of civic education in a literacy-based independent learning system. As well as the benefits of research as a place of reading for anyone who can read it as well as as a study and information about the independent education system learning in Indonesia with a literacy system. The method that used in this research is descriptive qualitative sourced from literature review as a trusted source. This study provides the results that; With the application of this model of the independent education education system, the implementation of Pancasila and citizenship or Pancasila education subjects is tied to the understanding of the related 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; politics, law, values, morals, local wisdom and diversity in the cultural system that exists in Indonesia

.Keywords: study1; independent 2; citizenship3

Pendahuluan

Konsep merdeka belajar merupakan sebuah gagasan yang diterpkan pemerintah Indonesias di sistem pendidikannya. Tujuan konsep merdeka belajar yang diterapkam oleh pemerintah sebagai suatu pembaharuan teori atau konsep yang diterapkan oleh pemetinah melalui diskusi dengan beberapa pakar praktisi pendidikan di Indonesia.

Adapaun hal-hal yang mendasari pembaharuan sistem pemebelajaran lama, menjadi konsep merdeka belajar di dalam sistem pendidikan diantaranya: (1) aspek Jurnal; di dalam sistem pendidikan Indonesia sanagat penting dan perlu memiliki landasan hukum dalam menguatkan suatu kebijakan dalam pendidikan yang diberlakukan, khususnya pada digantikannya UN (Ujian Nasional) dengan adanya penilaian kompetensi minimum dan survey karakter di tahun 2021, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan seluruh regulasi terkait pada hasil survey sistem lama tersebut.

Salah satu regulasi yang dipertimbangkan adalah terkiati Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015, mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 terkait Standar Nasioanal Pendidikan di Indonesia. Kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan hasil pengaturan terkait pelaksanaan UN di Indonesia, yang diubah metodenya menjadi standarisasi lain yang mendukung hasil; Asesmen Kompetensi Minimum dan Survey karakter peserta didik di tahun 2021 silam.

(2) terkait pada asesmen kompetensi minimum dan hasil suuveri karakter tersebut adapun diantaranya beberapa, indikasi yang

menjadi tolak ukur terkait perubahan sistem merdeka belajar didalam sistem penddikan di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya; (a) pada perubahan sistem pendidikan ini guru akan bertindak sebagai pelaksananya karena guru akan berhubungan langsung dengan para peserta didik di dalam internal kelas. (b) guru akan memahami dan menerapkan panduan mengenai literasi dan numerasi di dalam sistem pendidikana yang dilakukan di kelas, (c) sistem terbar ini akan lebih menyederhanakan RPP untuk mempermudah komunikasi antara guru dan administrasi, sistem dapat dibuat lebih jelas dan efisien.

Pada pemaparan tersebut mengartikan sistem pendidikan merdeka belajar yang diterapkan di Indonesia ini adalah; degan memberikan kebebasan kepada guru sebagai tenaga pendidik, dengan diberikannya hak dalam menyusun RPP versinya sendiri.

Penyederhanaan dan pemberian hak kepada guru dalam membuat RPP ini, dikarenakan guru lah yang menjadi pondasi dalam menentuk petunjuk tenis yang ada, mengingat guru yang sering dan selalu berhubungan dengan muri selama proses belajar ini berlangsung.

Kepala sekolah mewujudkan konsep belajar mandiri. Ia dituntut memiliki keterampilan manajemen dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya. Hal ini memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan di lembaga pendidikan yang dipimpinnya (Asmandri, 2014). Dedikasi seorang guru untuk mengembangkan belajar siswa tidak kalah pentingnya. Guru merupakan sosok pendidikan yang paling penting, memiliki

pengaruh yang kuat terhadap proses pendidikan. Guru bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pendidikan, yang meliputi pengorganisasian komponen-komponen pendidikan lainnya. Tanpa guru, proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik, karena peran tersebut tidak dapat digantikan oleh alat lain. Oleh karena itu, kepala sekolah dan guru perlu memiliki konsep manajemen yang efektif dalam manajemen pembelajaran.

Pembelajaran mandiri merupakan salah satu inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi siswa dan guru. Merdeka Learning didirikan setelah banyak orang tua dan wali yang mengeluhkan sistem pendidikan nasional selama ini. Salah satunya melibatkan referensi nilai-nilai tertentu.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif di sekolah. Inilah sebabnya mengapa label mengatakan "Kebebasan untuk belajar". Tujuan belajar mandiri adalah untuk guru, siswa dan orang tua, agar mereka memiliki suasana yang nyaman. Kebebasan belajar berarti bahwa pendidikan harus menciptakan suasana yang nyaman bagi semua pihak yang berkepentingan.

Disamping itu, hubungan penerapan metode pembelajaran yang baru ini, tentu saja memiliki kaitan erat dengan seluruh mata pelajaran yang ada di dalam daftar pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan. Salah satunya adalah mata pelajaran terkait pendidikan kewarganegaraan bagi anak-anak penerusa bangsa, di dalam internak sekolah atau perguruan tinggi.

Mengingat Era revolusi industri 4.0 sering disebut sebagai era disrupsi. Apalagi era Revolusi Industri 4.0 identik dengan *Big Data*, internet disegala bidang dan percetakan 3D, teknologi kecerdasan buatan dan terobosan inovasi iptek yang ditandai dengan banyaknya aplikasi bahkan seperti Grab, Gojek, BukaLapak, Airbnb, Traveloka, Lazada, Pegipigi.com, Smart City dan masih banyak inovasi lainnya yang membuat orang jarang bepergian dan seringkali membuat kita malas (malas bergerak) karena terbuai tidur dengan semua kemudahan yang instan. Ruang komunikasi akan semakin terbatas karena kita jarang bertemu dengan teman dan orang lain. Individu akan menjadi lebih individualistis dan kurang peka terhadap masyarakat, serta maraknya hoaks di era disrupsi data.

Hal ini menjadi pertimbangan penting mengingat perlunya penguatan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia agar setiap individu tidak hanya cerdas tetapi juga mampu, berkarakter, dan berwawasan sosial.

Pengenalan panchasila dan pelatihan pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran kewarganegaraan siswa, karena jika didasarkan pada tujuannya, atau dengan kata lain lebih dikenal sebagai pendidikan kewarganegaraan, memiliki fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan.

Winataputra & Budimansyah (2012) mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran dengan tujuan membentuk kepribadian bangsa.

Dalam konteks ini, peran kelangsungan hidup bangsa dan negara sangat strategis. Sebuah negara demokratis harus

mengandalkan keterampilan dan pengetahuan warganya agar tetap berfungsi. Hal ini bertujuan untuk mendidik warganya agar menjadi anggota masyarakat yang efektif dan produktif, serta menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

Selanjutnya menurut Budimansyah & Suryadi (Kariadi, 2017: 31) “Kebangsaan adalah salah satu bidang studi yang memenuhi misi nasional pendidikan untuk kehidupan bangsa”. Dalam dokumen ini, kami ingin memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang informasi kewarganegaraan, yang dapat membantu mereka menjadi lebih sadar akan tanggung jawab kewarganegaraan mereka.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu Susan Fitriyari, DKK. Berjudul; *Implementasi Program Belajar di Luar kampus Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan*. Penelitian terdahulu yang menjadi literatur ini selaras dengan jiwa penelitian ini, yang sama-sama membahas penerapan sistem pendidikan merdeka belajar dengan pendidikan kewarganegaraan. Adapun hasil penelitian tersebut adalah; didapatkan presentase pilihan pertama siswa kegiatan belajar di luar kampus. Pilihan terbanyak pada program pertukaran pelajar, yakni sebanyak 25,8 % serta mengajar di sekolah sebanyak 19,7%.

Hasil penelitian tersebut menandai bahwa merdeka belajar di dalam penerapan pendidikan kewarganegaraan memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi siswa atau peserta didik di dalam ruang lingkup kebebasan belajar di luar kelas. Dimana siswa mampu merasakan, dan mengeksplor dirinya dengan alur teori dan

pemahaman pada pendidikan kewarganegaraan selama di dalam kelas dengan mandiri.

Menyikapi hal tersebut, maka penelitian ini hendak melakukan penelitian sederhana terkait konsep pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di dalam kurikulum merdeka belajar yang berbasis dengan literasi. Rumusan masalah yang dapat diketahui dalam penelitian ini adalah; ”Bagaimana penerapan konsep pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada kurikulum merdeka belajar berbasis literasi, yang telah disahkan dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia?

Peneliti pembatasi permasalahan yang hendak dikaji ini berdasarkan kedudukan masalah yang diangkat, terkait sistem pendidikan merdeka belajar pada kewarganegaraan yang berbasis literasi di dalam penerapan proses belajar mengajar di kelas.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk sebuah standarisasi penilaian mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Universitas karakter bangsa, tujuan umum lain penelitian ini adalah; sebagai sebuah pembelajaran mengenai pemahaman penerapan pendidikan kewarganegaraan pada sistem merdeka belajar yang berbasis literasi.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka kebermanfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Sebagai sebuah wadah bacaan bagi siapapun yang dapat membacanya; (2) sebagai kajian dan informasi seputar sistem pendidikan merdeka belajar di Indonesia dengan sistem literasi, dan (3) sebagai sebuah tulisan karya ilmiah pendidikan kewarganegaraan, untuk melatih nalar dan analisis siswa Karakter Bangsa dalam memahami konsep

penerapan belajar berbasis pendidikan kewarganegaraan di Indonesais saat ini.

Metode

Adapun metodologi yang hendak digunakan oleh penulis adalah; metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, penelitian metode kualitatif ini digunakn dalam melakukan penelitian, untuk dapat melihat kondisi terhadap obyek yang sifatnya alamiah.

Dalam penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti adalah model deskriptif yang bersumber pada kajian pustaka sebagai bahan-bahan kajian yang hendak dikaji hingga menghasilkan kesepakatan atau kesimpulan yang jenuh dan spesifik. Kajian pustaka yang digunakan penulis adalah kajian pustaka berdasarkan infromasi literatur teortistis yang bersumber dari buku ataupun jurnal-jurnal terdahulu.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan yang bertujuan untuk membantu generasi penerus memahami hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan penting bagi peserta didik untuk berkembang menjadi pribadi yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, menjadi pribadi yang arif, toleran dan cinta damai, menjadi pribadi yang berilmu dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal,

nasional, dan internasional. Hal ini sejalan dengan esensi tujuan akademik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik yang bangga dengan Indonesia, cinta tanah air, jujur, hukum, bertanggung jawab, santun, dermawan dan percaya diri dalam berinteraksi di rumah berada. di sekolah dan di rumah. Di lingkungan mereka, serta dalam berbangsa dan bernegara, kelompok minoritas mengalami diskriminasi (Supriyanto, 2018:116).

Pendidikan Kewarganegaraan membantu warga negara untuk menyadari hak dan tanggung jawab mereka, dan untuk bekerja sama dan toleran terhadap orang lain. Pendidikan kewarganegaraan secara luas mencakup penyiapan generasi muda untuk peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, terutama sebagai warga negara.

Peranan pendidikan dalam konteks ini adalah untuk membantu mempersiapkan siswa untuk masa depan mereka. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi, termasuk proses mempersiapkan generasi muda untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya sebagai batu karang negara dalam persiapan rakyat.

Pendidikan ini membantu generasi masa depan mempelajari dan mengembangkan kemampuan mereka, serta karakter publik mereka. Quigley, Buchanan dan Bachmuller (1991: 11) "...sikap dan kebiasaan warga negara yang kondusif untuk berfungsinya dengan baik dan kebaikan bersama dari sistem demokrasi". Akibatnya, siswa akan lebih

memahami pentingnya perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam memahami pendidikan kewarganegaraan ini, dapat diketahui berdasarkan indikator yang ada di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, diantaranya:

(1) Perencanaan adalah proses mempersiapkan kebutuhan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan untuk pengembangan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang dapat didasarkan pada keinginan perancang dan kebutuhan untuk periode waktu tertentu. Tjokroamidjojo (Agustrian, 2017: 8) mempertegas bahwa, “Perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatankegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu”.

Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan siswa tentang bagaimana merencanakan pembelajaran mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan-tujuan ini dapat termasuk memperoleh Kompetensi spesifik, mempelajari berbagai bahan, dan mendapatkan manfaat praktis dari informasi yang dipelajari. Ini harus dipahami oleh siswa, karena akan membantu mereka belajar lebih efektif dan berprestasi lebih baik saat belajar. Berdasarkan hasil pemrosesan data, diketahui bahwa sebagian besar siswa yang mengikuti pembelajaran kewarganegaraan mampu memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh mereka, Kompetensi yang akan dicapai.

Banyak siswa yang mendapat manfaat dari mempelajari materi, tetapi tidak semua

siswa mendapatkan pendidikan ini dari tenaga kependidikan. Beberapa siswa mendapatkannya dari sumber lain, seperti membaca buku atau internet. Pendidik atau pelatih perlu memperhatikan hal ini agar dapat membuat kemajuan yang lebih baik.

(2) Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan; Tentu saja semuanya, termasuk belajar, pandai merencanakan saja tidak cukup, tetapi pembelajaran yang baik dengan perencanaan yang baik juga dapat dilakukan dalam pembelajaran yang baik. George R. Terry (1986; Agustrian, 2017:8) menjelaskan bahwa “implementasi adalah upaya menggerakkan anggota tim dengan cara yang mereka inginkan dan upayakan untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama perusahaan, sehingga mereka juga ingin mencapai tujuan tersebut.

Prestasi pembelajaran yang baik adalah karakteristik dari sistem pembelajaran yang baik, direncanakan terlebih dahulu, melalui orientasi dan motivasi agar kegiatan berlangsung dengan cara yang paling efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pembelajaran adalah proses yang dinamis yang melibatkan pendidik, siswa, dan bahan pembelajaran. Aktivitas pembelajaran melibatkan mengambil inisiatif, melakukan beberapa kegiatan dasar, dan menyelesaikan proses.

Strategi dan tindakan yang berbeda harus digunakan untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, dan kemudian contoh apa yang ditutupi dalam pelajaran tertentu harus disediakan untuk membantu mereka tetap fokus. Staf pendidikan harus menyediakan bahan pembelajaran yang menarik dan

beragam untuk siswa, dan hasil penelitian dapat digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut.

Agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah direncanakan sebelumnya, tidak boleh menyimpang dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

(3) Penilaian adalah proses pengumpulan informasi untuk mengevaluasi seberapa baik individu atau kelompok telah melakukan. Ini adalah bagian penting dari setiap kegiatan pembelajaran.

Baharudin (2014: 251; Agustrian, 2017: 9) berpendapat bahwa “evaluasi bukan sekedar evaluasi spontan dan acak terhadap suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang bertujuan mengevaluasi sesuatu secara sistematis, yang rencana dan arahnya didasarkan pada derivasi eksplisit”. Penilaian pembelajaran dapat diukur dengan sejauh mana pembelajaran mempengaruhi atau berdampak pada perubahan.

Berdasarkan ketiga konsep di atas, maka pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan sebuah pemahaman atau pembelajaran yang diajarkan kepada seluruh peserta didik dari setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Pengaplikasian pembelajaran untuk sistem pembelajaran 'Siswa Independen' ini memiliki dasar hukum yang melibatkan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, sebagai tanggung jawab untuk melaksanakan mandat:

(a) Pembukaan UUD 1945 alinea IV: dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) Pasal 31, pada ayat 3, yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan

dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (c) UU Sisdiknas Tahun 2003; menimbang bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; dan (d) UU Sisdiknas tahun 2003, Pasal 3: menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab; dan (e). Nawacita kelima untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

Pentingnya memiliki SDM yang efektif adalah kunci dalam menyelesaikan masalah negara, seperti yang disarankan oleh Mendikbud: “Apapun kompleksitas masa depan, kalau SDM kita bisa menangani kompleksitas maka itu tidak menjadi masalah” (FORWAS Edisi ke3/2019).

SDM adalah pusat intelijen terkemuka yang memiliki kelebihan kompetitif yang kuat di pasar global. Dia siap menghadapi tantangan globalisasi. Selain itu, rakyat Indonesia hari ini

menghadapi tantangan eksternal seperti keberadaan revolusi industri 4.0 fokus pada sistem fisik elektronik, didukung oleh kemajuan teknologi, basis pengetahuan, inovasi, dan jaringan, yang mewakili era konfirmasi kedatangan abad kreatif.

Tantangan lain yang internal, seperti gejala melemahkan mentalitas bangsa, adalah hasil dari dampak informasi media sosial. Tentu saja, mengatasi tantangan ini memastikan pertumbuhan dan perkembangan talenta berkualitas, bertindak cepat dan akurat, serta memungkinkan mereka beradaptasi dengan baik untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak negatif dari gelombang besar perubahan. kualitas pendidikan. Sayangnya, kondisi pendidikan kami tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Satu indikator kesediaan akademis siswa didasarkan pada hasil level literatur mereka di Pisa 2015. Ini termasuk tiga aspek yang berbeda. Pembacaan, matematika, dan keterampilan ilmiah masih berada di peringkat rendah, tetapi mereka telah kehilangan tanah untuk negara-negara seperti Vietnam.

Penerapan konsep pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pada masa ini, dengan sistem merdeka belajar berbasis literasi memiliki makna dan karakteristik yang khas dalam penerapan selama proses pembelajaran berlangsung.

Sistem pembelajaran Indonesia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dengan kurikulum yang berbeda diterapkan ke dalamnya tergantung pada situasi. Kurikulum terbaru dalam perjalanannya ini telah sampai pada tahun 2000-an yang dicetuskan dengan

model sistem pembelajaran merdeka dengan literasi.

Implementasi pada pendidikan kewarganegaraan ini adalah; perwujudan pendidikan dengan pemahaman terkait ilmu-ilmu dasar Pancasila dengan hukum dan norma yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia. Pada prinsipnya, dalam kurikulum merdeka belajar yang disahkan pada tahun 2020 di dasari dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti Mendikbud di Era kepemimpinan Nadiem Makarim yang menjadi tokoh sekaligus penggagas metode pembelajaran dengan model wacana pendidikan merdeka belajar, yang diutamakan pada sistem kampus atau perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Menurut pemahaman Naidem, Kemendikbud pada aspek pendidikan, perlu memahami dan menyusun suatu target pada sistem pendidikannya yang lebih baik lagi. Dirinya mengatakan bahwa strategi yang tengah digodoknya ini adalah strategi yang dapat membantu keluar dari esensi pendidikan, yaitu kualitas bagi tangan pendidiknya itu sendiri.

Tenaga pendidik mungkin saja dikemudian hari dapat digantikan dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih. Namun, dalam hal ini, teknologi harus digunakan oleh guru sebagai medium pembelajaran sehingga suasana pembelajaran lebih hidup dan aktif daripada sebelumnya, karena berjalannya model belajar diiringi dengan konsep modern yang ada di tengah kehidupan saat ini.

Dilansir dari laman kemendikbud.go.id, Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan

terkait tiga poin penting dan utama dalam gagasan merdeka belajar yang diusulkannya tersebut. Tiga poin ini adalah teknologi unyuk akselerasi, keberagaman sebagai esensi, serta profil pancasila sebagai landasan pedoman yang utama.

Kain pertama yang disebutkan di atas ialah faham yang berkaitan dengan teknologi dan informasi di dalam media komunikasi, serta poin dua dan tiga yang kuat dengan pemahaman penerapan pendidikan kewarganegaraan.

Dua poin tersebut menjelaskan adanya penguatan di dalam sistem merdeka belajar dimana, keberagaman esensi yakni; keberagaman minat dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang hakikatnya memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, yang tidak dapat disama ratakan dari satu segi saja.

Alasan tersebut menjadi sangat kokoh sebagai tolak ukur kinerja siswa yang sejatinya tidak dapat dinilai hanya menggunakan angka pencapaian akademik semata. Namun, sebagai pendidik atau sekolah yang menyediakan ruang pendidikan bagi peserta didik, perlu dan mampu menciptakan aktivitas lain atau ekstrakurikuler yang baik.

Kearifan Indonesia memainkan peran penting dalam sistem pendidikan, yang digunakan di kelas atau sekolah dan universitas. Dimana ada beberapa siswa atau peserta didik yang merasa lebih memahami materi yang diberikan apa bila menggunakan konteks lokal saja.

Terkait program pendidikan merdeka belajar ini dengan pancasila sendiri, adalah bentuk penyematan pada sistem pendidikan Indonesia, sebagaimana amanah dari Presiden

Republik Indonesia bahwa; kemendikbud hendak menetapkan enam indikator sebagai profil belajar pancasila di dalam tiap kurikulum sebagai pembelajaran yang wajib.

Dimana keenam profil ini dapat dipahami diantaranya: Kritis, kemandirian bagi siswa atau peserta didik, kreatif, gotong royong, kebinekaan yang bersifat global, dan berakhlak mulia sebagaimana penerapan dari norma atau nilai pancasila nomor satu; "ketuhanan yang maha esa".

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pemahaman di atas, maka penulis hendak menyimpulkan penelitian ini bahwa; pada konsep penerapan kurikulum merdeka belajar ini memberikan pemahaman pada konsep pendidikan kewarganegaraan yang sangat jelas, bahkan dalam penerapan pembelajaran di sistem merdeka belajar saat ini, hakikatnya peserta didik telah mengamalkan nilai-nilai dari pendidikan kewarganegaraan secara tidak langsung.

Perkembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan disesuaikan dengan isi dan misi pemerintah yang mempengaruhi dalam membetuknya suatu kebijakan pendidikan di Indonesia. Dengan penerapan model sistem pendidikan merdeka belajar ini, pelaksanaan mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan atau pancasila ini dikaitkan pada pemahaman Undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 terkait; politik, hukum, nilai, moral, kearifan lokal dan kebinekaan dalam sistem kebudayaan yang ada di Indonesia.

Referensi

- Winataputra, Udin. & Dasim Budimansyah. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran). Bandung: Widya Aksara Press.
- Kariadi, Dodik. (2017). Generasi Yang Berwawasan Global Berkarakter Lokal Melalui Harmonisasi Nilai Kosmopolitan Dan Nasionalisme Dalam Pembelajaran Pkn. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 1. Nomor 2.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Supriyanto, Anton. (2018). Upaya Untuk Meningkatkan Keberanian Berpendapat Dan Prestasi Belajar Melalui Penerapan Model Dilema Moral Mata Pelajaran PPKn. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pkn*. Volume 5, No.2 , November 2018, pp. 116-122.
- Keer, David. (1999). *Citizenship Education: An International Comparison*. England: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Quigley, C.N., Buchanan, Jr. J.H., Bachmueller, C.F. (1991). *Civitas: A Framework for Civic Education*. Calabasas: CCE.
- Agustrian N,L., Rizkan., Izzudin M. (2017). Manajemen program life skill. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 1 (1), 7-12.